



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN**

JALAN. SIMPANG TOBOH V KOTO KAMPUNG DALAM
PARIAMAN , KOTAK POS NO. 112 PARIAMAN, 25501
TELEPON (0751) 690123,690123 FAXSIMILE (0751) 690123

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PARIAMAN
NOMOR: SK.230/SUPM.PRM /TU.110 /VII/2025**

**TENTANG
STANDAR PRODUK LAYANAN MAGANG/PKL
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN
TAHUN 2025**

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PARIAMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap masyarakat pengguna layanan atas pelayanan yang disediakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman;
- b. bahwa standar pelayanan publik sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan B, Standar Produk Pelayanan Legalisir tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi.
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Nega
6. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Caa Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
7. Peraturan Pemerintah 62 Tahun 2014 Mengatur Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan KP.

8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Patata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Peoman Umum Reformasi Birokrasi.
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 3/KEPMEN_KP/2019 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PRODUK PELAYANAN MAGANG/PKL DI SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN.**
- Pertama : Standar Produk Pelayanan Legalisir SUPM Pariaman adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Penjelasan yang termuat dalam lampiran keputusan ini adalah sebagaimana satu kesatuan yang utuh dari Standar Produk Pelayanan Publik SUPM Pariaman adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Standar Produk Pelayanan Magang/PKIL SUPM Pariaman merupakan landasan, pedoman dan tuntutan bagi setiap sub bagian pada lingkup SUPM Pariaman dalam memberikan pelayanan publik ,baik yang bersifat Internal ataupun eksternal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.
- Keempat : Standar Produk Magang/PKIL SUPM Pariaman harus dipahami dilaksanakan dan disebarluaskan oleh seluruh pegawai SUPM Pariaman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak di ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman,
Pada Tanggal : 23 juli 2025
Kepala SUPM Pariaman,



Adnal Yeka

Lampiran I

Nomor : SK.230/ SUPM.PRM/TU.110/VII/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUH DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG DI TETAPKAN DA APABILA DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN., KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDNG – UNDANGAN YANG BERLAKU DAN SIAP MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR SERTA MELAKUKAN INOVASI PELAYANAN SECARA TERUS MENERUS.

Ditetapkan di : Pariaman,
Pada Tanggal : 23 juli 2025
Kepala SUPM Pariaman,



Adnal Yek

Lampiran I

Nomor : SK.230/ SUPM.PRM/TU.110/VII/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

STANDAR LAYANAN MAGANG/PKL SUPM PARIAMAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revalidasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan permohonan layanan legalisir : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar/ Permohonan/Tugas dari Instansi terkait.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Magang/PKL dapat mengajukan permohonan dengan datang langsung ke loket pelayanan di gedung pelayanan public atau melalui Website PPID SUPM Pariaman. 2. Petugas Pelayanan menyerahkan surat permohonan ke Kasubbag Umum. 3. Permohonan di ajukan ke kepala sekolah. 4. Permohonan diterima oleh Kepala sekolah. 5. Penunjukan pegawai pembimbing Pemagang/PKL. 6. Seminar Proposal/ Pemaparan pelaksanaan magang/PKL di SUPM Pariaman. 7. Pelaksanaan pemagangan/PKL yang sudah ditentukan. 8. Seminar hasil pelaksanaan magang/PKL.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 90 hari (3 bulan)
5	Biaya/Tarif	Magang / PKL : (Disesuaikan dengan penggunaan bahan atau alat yang digunakan)
6	Produk Layanan	Pelaksanaan Magang atau PKL
7	Sarana, Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) TEFA Penangkapan 2) TEFA Permesinan 3) TEFA Budidaya 4) TEFA Pengolahan
8	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi dibidang Masing – masing. 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pendidikan, 3. Memiliki Kompetensi dibidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi) 4. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal penanganan pengaduan Sikap : Memiliki kedipsilnan, Kejujuran, Kerja sama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, Budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP. 2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal SUPM Pariaman. 3. Dilakukan oleh Kepala SUPM Pariaman. 4. Dilakukan oleh Atasan Langsung Kehumasan. 5. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
10	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelayanan 2 orang. 2. Staf akademik 1 orang. 3. Arsiparis 1 orang. 4. Kasubbag TU 1 orang. 5. Wakil kepala SUPM bidang kurikulum 1 orang. 6. Kepala SUPM Pariaman 1 orang.
11	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu. 2. Jaminan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keselamatan dan rahasia data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.

No	Komponen	Uraian
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (kali) dalam setahun, dan selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
14	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Publik; 2. Ruang Pengajaran SUPM Pariaman. 3. Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-pariaman/, atau 4. Website lapor : https://lapor.kkp.go.id; 5. E-mail : bppsdm.supmpariaman@gmail.com 6. Kotak Pengaduan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman, Jl. Padang birik – birik, simpang V kampung dalam

Kepala SUPM Pariaman,



Adnal Yeka

